

**PENGARUH PEMAHAMAN AKUNTANSI, PENERAPAN SISTEM  
AKUNTANSI, DAN KETAATAN PERATURAN PERUNDANG-  
UNDANGAN TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA PADA  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANYUASIN**

**SKRIPSI**

**Untuk Memenuhi Sebagian Dari Syarat-Syarat  
Guna Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi**



**Diajukan Oleh:  
ISTI IMANIATI  
NPM. 1801120507**

**FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS TRIDINANTI  
PALEMBANG**

**2022**

**UNIVERSITAS TRIDINANTI**

**FAKULTAS EKONOMI**

**PALEMBANG**

**HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI**

Nama : Isti Imaniati  
Nomor Pokok/ NIM : 1801120507  
Jurusan/ Prog. Studi : Akuntansi  
Jenjang Pendidikan : Strata I (S1)  
Mata Kuliah Pokok : Akuntansi Pemerintah  
Judul Skripsi : Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Penerapan Sistem Akuntansi, dan Ketaatan Peraturan Perundang-Undangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Banyuasin

Pembimbing Skripsi

Tanggal 05/10/22 Pembimbing I:



Yancik Syafitri, SE., M.Si  
NIDN: 0225026401

Tanggal 05/10/22 Pembimbing II:



Rifani Akbar Sulbahri, SE,MM,M.Ak,Ak,CA,ACPA,CSRS  
NIDN: 0231058801

28 / PS / DFE / 22

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi

Ketua Program Studi Akuntansi



Dr. Msy. Mikial, SE., M.Si, Ak, CA, CSRS  
NIDN: 0205026401



Meti Zuliyana, SE, M.Si, Ak, CA, CSRS  
NIDN: 0205056701

**UNIVERSITAS TRIDINANTI**

**FAKULTAS EKONOMI**

**PALEMBANG**

**HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI**

Nama : Isti Imaniati  
Nomor Pokok/ NIM : 1801120507  
Jurusan/ Prog. Studi : Akuntansi  
Jenjang Pendidikan : Strata I (S1)  
Mata Kuliah Pokok : Akuntansi Pemerintah  
Judul Skripsi : Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Penerapan Sistem Akuntansi, dan Ketaatan Peraturan Perundang-Undangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Banyuasin

Penguji Skripsi

Tanggal ..05/10/22..Ketua Penguji :



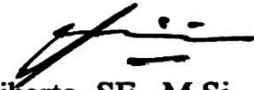
Yancik Syafitri, SE., M.Si  
NIDN: 0225026401

Tanggal ..05/10/22..Penguji I:



Rifani Akbar Sulbahri, SE,MM,M.Ak.Ak.CA,ACPA,CSRS  
NIDN: 0231058801

Tanggal ..05/10/22..Penguji II :



Sugiharto, SE., M.Si., Ak.CA  
NIDN: 0205096701



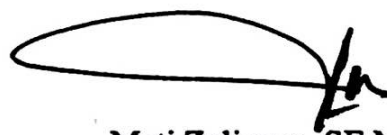
Mengesahkan,

Dekan Fakultas Ekonomi

Ketua Program Studi Akuntansi



Dr. Msv. Mikial, SE., M.Si., Ak.CA.CSRS  
NIDN: 0205026401



Meti Zuliyana, SE.M.Si.Ak.CA.CSRS  
NIDN:0205056701

## PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Isti Imaniati  
Nomor Pokok : 1801120507  
Fakultas : Ekonomi  
Program Studi : Akuntansi  
Program Pendidikan : Strata 1 (S1)  
Skripsi : Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Penerapan Sistem Akuntansi, dan Ketaatan Peraturan Perundang-Undangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Banyuasin

Menyatakan bahwa skripsi ini telah ditulis dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang merupakan penjiplakan karya orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa dalam skripsi ini terkandung ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Palembang, September 2022

Penulis,



Isti Imaniati

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### MOTTO :

**“Dan apa saja nikmat yang ada pada kamu, maka dari Allah-lah (datangnya), dan apabila kamu ditimpa oleh kemudharatan, maka hanya kepada-Nya lah kamu meminta pertolongan”**

**(QS. An-Nahl : 53)**

**“Sesungguhnya setelah kesulitan ada kemudahan”**

**(QS. Al-Insyirah : 6)**

### PERSEMBAHAN

**Skripsi ini saya persembahkan untuk :**

- ❖ **Allah SWT**
- ❖ **Kedua Orang Tuaku Ayah (H. Supardi, S.Pd., M.Si) dan Ibu (Hj. Rusmida)**
- ❖ **Saudaraku Kakak (Dede Imansyah Putra, ST) dan Adik (Muhammad Rizqi)**
- ❖ **Dosen Pembimbing Skripsiku Bapak (Yancik Syafitri, SE.,M.Si) dan Bapak (Rifani Akbar Sulbahri, SE.,MM.,M.Ak. Ak.,CA.,ACPA.,CSRS)**
- ❖ **Seseorang yang InsyaAllah akan menjadi pendamping hidupku (Kurniawan Nopriansyah, SH)**
- ❖ **Sahabat-Sahabatku**
- ❖ **Teman-Teman Seperjuangan**
- ❖ **Almamater Tercinta**

## **KATA PENGANTAR**

### **Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh**

Bismillahirrahmanirrahim

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT. karena limpahan hidayah, nikmat dan kasih sayang-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, shalawat dan salam semoga terus mengalir kepada Nabi Muhammad SAW. beserta keluarga, sahabat, dan pengikutnya hingga akhir zaman. Sesuai kurikulum dari Universitas Tridinanti Palembang bahwa setiap mahasiswa diwajibkan membuat skripsi guna memenuhi tugas dan syarat akhir dari kelulusan yang telah ditetapkan.

Dalam penulisan laporan ini, saya selaku penulis menyadari bahwa masih ada kekurangan dan kelemahan, namun demikian bekal ilmu yang dimiliki. Dengan banyaknya pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini penulis mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Dr. Ir. Hj. Manisah, M.P, selaku Rektor Universitas Tridinanti Palembang.
2. Ibu Dr. Msy. Mikial, SE., M.Si., Ak.CA.,CSRS, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Tridinanti Palembang.
3. Ibu Meti Zuliyana, SE., M.Si., Ak.CA., CSRS, selaku Ketua Jurusan Program Studi Akuntansi Universitas Tridinanti Palembang.
4. Bapak Yancik Syafitri, SE., M.Si, selaku Dosen Pembimbing I dalam penulisan skripsi ini.
5. Bapak Rifani Akbar Sulbahri, SE., MM., M.Ak., Ak.CA., ACPA., CSRS, selaku dosen pembimbing II dalam penulisan skripsi ini.
6. Ibu Ernawati, SE., Ak., MM, selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing selama proses belajar di Fakultas Ekonomi Universitas Tridinanti Palembang.
7. Bapak-bapak dan Ibu-ibu Dosen yang telah memberi bimbingan selama proses belajar di Fakultas Ekonomi Universitas Tridinanti Palembang.

8. Bapak Dr. H. M. Senen Har, S.IP., M.Si, selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuasin.
9. Seluruh responden yang telah memberikan waktu dan informasi untuk membantu penyelesaian skripsi ini.
10. Kedua Orang tuaku yang saya cintai dan seluruh keluarga yang selalu senantiasa mendukung dan memberikan doanya, dan mengharapkan keberhasilan penulis.
11. Seseorang yang insya Allah akan menjadi pendamping hidup, atas segala motivasi, perhatian, doanya, dan selalu menemani penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Seluruh sahabat dan teman-teman Mahasiswa Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Tridianti Palembang Angkatan 2018 yang telah bersama dengan penulis berjuang untuk mendapatkan ilmu bermanfaat agar kelak kita dapat memberikan yang terbaik tidak hanya untuk diri sendiri melainkan juga untuk bangsa dan tanah air.
13. Semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyelesaian skripsi ini.

Atas semua bantuan yang telah diberikan kepada penulis dalam menyelesaikan laporan ini, penulis ucapkan banyak terima kasih. Semoga dengan adanya skripsi ini dapat berguna bagi kita semua dan semoga amal ibadah kita diterima Allah SWT. sehingga setiap langkah kita mendapat ridho, taufik, dan hidayah-Nya, Aamiin.

**Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh**

Palembang, September 2022

Isti Imaniati

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT.....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xiii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xv</b>
<b>RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Perumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Manfaat Penelitian.....	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>10</b>
2.1 Kajian Teoritis.....	10
2.1.1 Teori Keagenan ( <i>Agency Theory</i> ).....	10
2.1.2 Pengelolaan Keuangan Daerah.....	11
2.1.3 Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.....	12
2.1.3.1 Tujuan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.....	14
2.1.3.2 Prinsip-Prinsip Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.....	15
2.1.3.3 Siklus Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.....	16
2.1.4 Pemahaman Akuntansi Pemerintah.....	18
2.1.4.1 Indikator Pemahaman Akuntansi.....	19
2.1.5 Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah.....	21
2.1.5.1 Tujuan Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah.....	24



2.1.6 Ketaatan pada Peraturan Perundang-Undangan.....	25
2.2 Penelitian Lain yang Relevan.....	27
2.3 Kerangka Konseptual.....	36
2.4 Hipotesis Penelitian.....	39
2.4.1 Hubungan Pemahaman Akuntansi, Penerapan Akuntansi Pemerintah Daerah, Ketaatan Peraturan Perundang-Undangan dan Akuntabilitas Kinerja.....	39
2.4.2 Hubungan Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah dan Akuntabilitas Kinerja.....	40
2.4.3 Hubungan Pemahaman Akuntansi Pemerintah dan Akuntabilitas Kinerja.....	41
2.4.4 Hubungan Ketaatan Peraturan Perundang-Undangan dan Akuntabilitas Kinerja.....	42
<b>BAB III METODELOGI PENELITIAN.....</b>	<b>44</b>
3.1 Tempat dan Waktu Penelitian.....	44
3.1.1 Tempat Penelitian.....	44
3.1.2 Waktu Penelitian.....	44
3.2 Sumber dan Teknik Pengumpulan Data.....	44
3.2.1 Sumber Data.....	44
3.2.2 Teknik Pengumpulan Data.....	45
3.3 Populasi, Sampel, dan Sampling.....	46
3.3.1 Populasi.....	46
3.3.2 Sampel.....	46
3.3.3 Sampling.....	48
3.4 Rancangan Penelitian.....	48
3.5 Variabel dan Definisi Operasional.....	49
3.5.1 Variabel.....	49
3.5.1.1 Variabel Dependen.....	49
3.5.1.2 Variabel Independen.....	49
3.5.2 Definisi Operasional.....	49
3.6 Instrumen Penelitian.....	52

3.7 Teknik Analisis Data.....	52
3.7.1 Statistik Deskriptif.....	53
3.7.2 Uji Kualitas Data.....	53
3.7.2.1 Uji Validitas.....	53
3.7.2.2 Uji Relibilitas.....	54
3.7.3 Uji Normalitas.....	55
3.7.5 Analisis Regresi Linear Berganda.....	55
3.7.6 Uji Koefisien Korelasi.....	57
3.7.7 Uji Koefisien Determinasi.....	58
3.7.8 Uji Hipotesis Penelitian.....	59
3.7.8.1 Uji Statistik F.....	59
3.7.8.2 Uji Statistik t.....	60
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>61</b>
4.1 Hasil Penelitian.....	61
4.1 Hasil Penelitian.....	61
4.1.1 Gambaran Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Banyuasin.....	61
4.1.1.1 Visi dan Misi Kabupaten Banyuasin.....	62
4.1.1.2 Struktur Organisasi.....	63
4.1.2 Deskripsi Data.....	74
4.1.3 Deskripsi Responden.....	75
4.1.4 Statistik Deskriptif.....	78
4.1.5 Hasil Uji Kualitas Data.....	79
4.1.5.1 Uji Validitas.....	79
4.1.5.2 Uji Relibilitas.....	82
4.1.6 Uji Normalitas.....	83
4.1.7 Analisis Regresi Linear Berganda.....	85
4.1.8 Uji Koefisien Korelasi.....	87
4.1.9 Uji Koefisien Determinasi.....	89
4.1.10 Uji Hipotesis Penelitian.....	90
4.1.10.1 Uji Statistik F.....	90
4.1.10.2 Uji Statistik t.....	91

4.2 Pembahasan.....	92
4.2.1 Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Penerapan Akuntansi Pemerintah Daerah, Ketaatan Peraturan Perundang-Undangan dan Akuntabilitas Kinerja.....	92
4.2.2 Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah dan Akuntabilitas Kinerja.....	94
4.2.3 Pengaruh Pemahaman Akuntansi Pemerintah dan Akuntabilitas Kinerja.....	95
4.2.4 Pengaruh Ketaatan Peraturan Perundang-Undangan dan Akuntabilitas Kinerja.....	96
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>98</b>
5.1 Kesimpulan.....	98
5.2 Saran.....	98
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>99</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel</b>		<b>Halaman</b>
2.1	Penelitian Yang Relevan.....	31
3.1	Sampel Penelitian.....	47
3.2	Variabel dan Definisi Operasional.....	50
4.1	Rincian Pengiriman dan Pengembalian Kuesioner.....	75
4.2	Deskripsi Responden.....	76
4.3	Hasil Statistik Deskriptif.....	78
4.4	Hasil Uji Validitas Pemahaman Akuntansi.....	80
4.5	Hasil Uji Validitas Penerapan Sistem Akuntansi.....	80
4.6	Hasil Uji Validitas Ketaatan Peraturan Perundang-Undangan.....	81
4.7	Hasil Uji Validitas Akuntabilitas Kinerja.....	81
4.8	Hasil Uji Reliabilitas.....	82
4.9	Hasil Uji Statistik <i>Kolmogrov-Smirnov</i> .....	85
4.10	Hasil Analisis Regresi Linear Berganda.....	86
4.11	Hasil Uji Koefisien Korelasi.....	87
4.12	Hasil Uji Koefisien Determinasi.....	89
4.13	Hasil Uji F.....	90
4.14	Hasil Uji t.....	91

## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar</b>		<b>Halaman</b>
2.1	Kerangka Konseptual.....	39
4.1	Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Banyuasin..	64
4.2	Histogram Uji Normalitas.....	83
4.3	Grafik Normal P-Plot.....	84

## ABSTRAK

**ISTI IMANIATI, Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Penerapan Sistem Akuntansi, dan Ketaatan Peraturan Perundang-Undangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Banyuasin. (Dibawah bimbingan Bapak Yancik Syafitri, SE., M.Si dan Bapak Rifani Akbar Sulbahri, SE., MM., M.Ak., Ak., CA., ACPA., CSRS).**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Penerapan Sistem Akuntansi, dan Ketaatan Peraturan Perundang-Undangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Banyuasin. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Pegawai yang ada pada Sekretariat Daerah Kabupaten Banyuasin dengan sampel penelitian sebanyak 50 responden yang terdiri dari Bendahara, PPK, dan PPTK. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda dengan bantuan Program SPSS 24.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh pemahaman akuntansi, penerapan sistem akuntansi, dan ketaatan peraturan perundang-undangan terhadap akuntabilitas kinerja pada Sekretariat Daerah Kabupaten Banyuasin dengan nilai signifikan  $F$  sebesar  $0,000 < 0,05$ . Persamaan regresi linear berganda  $Y = 6,811 + 0,191X_1 + 0,526X_2 + 0,438X_3 + e$ . Pemahaman Akuntansi berpengaruh Terhadap Akuntabilitas Kinerja Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Banyuasin dengan nilai signifikan  $0,026 < 0,05$ . Penerapan Sistem Akuntansi berpengaruh Terhadap Akuntabilitas Kinerja Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Banyuasin dengan nilai signifikan  $0,001 < 0,05$ . Ketaatan Peraturan Perundang-Undangan berpengaruh Terhadap Akuntabilitas Kinerja Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Banyuasin dengan nilai signifikan  $0,000 < 0,05$ .

**Kata Kunci : Pemahaman Akuntansi, Penerapan Sistem Akuntansi, Ketaatan Peraturan Perundang-Undangan, Akuntabilitas Kinerja**

## **ABSTRACT**

***ISTI IMANIATI, The Effect of Accounting Understanding, Application of Accounting Systems, and Compliance with Legislation Against Performance Accountability at the Regional Secretariat of Banyuasin Regency. (Under the guidance of Mr. Yancik Syafitri, SE., M.Si and Mr. Rifani Akbar Sulbahri, SE., MM., M.Ak., Ak., CA., ACPA., CSRS).***

*This study aims to determine whether there is an effect of understanding accounting, application of accounting systems, and compliance with laws and regulations on performance accountability at the Banyuasin Regency Regional Secretariat. The population in this study were all employees at the Regional Secretariat of Banyuasin Regency with a research sample of 50 respondents consisting of the Treasurer, PPK, and PPTK. The data analysis technique used is multiple linear regression analysis with the help of SPSS 24 program.*

*The results of this study indicate that there is an effect of understanding accounting, application of accounting systems, and compliance with laws and regulations on performance accountability at the Regional Secretariat of Banyuasin Regency with a significant F value of  $0.000 < 0.05$ . Multiple linear regression equation  $Y = 6.811 + 0.191X_1 + 0.526X_2 + 0.438X_3 + e$ . Accounting understanding has an effect on Performance Accountability at the Regional Secretariat of Banyuasin Regency with a significant value of  $0.026 < 0.05$ . The application of the accounting system has an effect on performance accountability at the Banyuasin Regency Regional Secretariat with a significant value of  $0.001 < 0.05$ . Compliance with laws and regulations has an effect on Performance Accountability at the Regional Secretariat of Banyuasin Regency with a significant value of  $0.000 < 0.05$ .*

***Keywords: Accounting Understanding, Accounting System Implementation, Compliance with Legislation, Performance Accountability***

## **RIWAYAT HIDUP**

**ISTI IMANIATI**, dilahirkan di Pangkalan Balai pada tanggal 17 Desember 1999 dari Bapak H. Supardi, S.Pd., M.Si dan Ibu Hj. Rusmida, anak kedua dari tiga bersaudara.

Taman Kanak-Kanak (TK) diselesaikan pada tahun 2005 di TK Dharma Wanita Pangkalan Balai, Sekolah Dasar diselesaikan pada tahun 2011 di SD Negeri 21 Banyuasin III, Sekolah Menengah Pertama diselesaikan tahun 2014 di SMP Negeri 1 Banyuasin III, Sekolah Menengah Atas diselesaikan pada tahun 2017 di SMA Negeri 1 Banyuasin III. Pada tahun 2018 memasuki Fakultas Ekonomi Program Studi Akuntansi Universitas Tridianti Palembang.

Palembang, September 2022

Penulis,

Isti Imaniati



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Konsep akuntabilitas bukan hal yang baru di Indonesia, hampir seluruh instansi dan lembaga-lembaga pemerintah menekankan konsep akuntabilitas dalam menjalankan fungsi administratif pemerintahan. Akuntabilitas terkait erat dengan instrumen untuk mengontrol suatu kegiatan terutama dalam hal pencapaian hasil pada pelayanan publik. Akuntabilitas menurut (Mahsun., dkk, 2018: 18) yaitu:

“Akuntabilitas merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban publik atas pengelolaan organisasi yang sumber pendanaannya secara tidak langsung adalah dari masyarakat (publik).”

Tercantum dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, mengharuskan Pemerintah memenuhi akuntabilitas dengan memperhatikan beberapa hal, yaitu pemahaman akuntansi pemerintah, penerapan sistem akuntansi pemerintah daerah, dan ketaatan pada peraturan perundang-undangan.

Informasi keuangan pemerintah daerah saat ini menjadi suatu keharusan yang wajib untuk disampaikan, hal ini bertujuan untuk menciptakan suatu bentuk akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2010 dan Peraturan Menteri Nomor 74 Tahun 2016. Proses penyiapan laporan keuangan pemerintah daerah diperlukan dukungan

pengetahuan akuntansi yang memadai atas standar yang mengatur penyusunan laporan keuangan instansi pemerintah. Sistem pertanggungjawaban keuangan suatu institusi dapat berjalan dengan baik, bila terdapat mekanisme pengelolaan keuangan yang baik (Mardiasmo, 2018 : 27). Pemahaman sistem akuntansi diperlukan untuk dapat menyajikan informasi keuangan yang memadai dalam bentuk pelaporan keuangan yang dapat dipahami oleh pengguna, maka harus dilakukan oleh orang yang memiliki kompetensi dibidang pengelolaan keuangan daerah. Adanya pemahaman akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan yang efektif, harus memenuhi prinsip dengan mengikuti standar akuntansi pemerintah yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2010.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, standar akuntansi pemerintah adalah prinsip-prinsip akuntansi yang ditetapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Penyusunan laporan keuangan yang berpedoman pada standar akuntansi pemerintah bermanfaat untuk pemenuhan kebutuhan informasi keuangan secara umum yang lebih berkualitas bagi para pengguna laporan keuangan dalam rangka menilai akuntabilitas dan membuat keputusan ekonomi, sosial, maupun politik.

Basis penerapan standar akuntansi pemerintah yaitu berbasis kas dan berbasis akrual. Basis akuntansi yang digunakan untuk laporan keuangan pemerintah adalah basis kas, sedangkan basis akrual digunakan untuk pengakuan asset, kewajiban, dan ekuitas dalam neraca. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, yaitu basis kas untuk

laporan realisasi anggaran berarti pendapatan diakui pada saat kas diterima direkening kas umum negara/ daerah atau oleh entitas pelaporan dan belanja diakui pada saat kas dikeluarkan dari rekening kas umum negara/ daerah atau entitas pelaporan. Basis akrual digunakan untuk neraca berarti asset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi atau pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah tanpa memperhatikan saat uang kas dan setara kas diterima/ dibayar.

Ketaatan peraturan perundang-undangan juga merupakan elemen penting yang secara langsung berkaitan dengan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, selain dari pemahaman akuntansi pemerintah, penerapan sistem akuntansi pemerintah daerah. Menurut (Hasanah dan Ahmad, 2017 : 36), pelaporan keuangan pemerintah diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan pemerintah. ketaatan pejabat terhadap diberlakukannya peraturan tersebut menjadi salah satu aspek yang juga memberikan pengaruh terhadap terlaksananya kinerja yang maksimal dari Pemerintah Daerah. Instansi Pemerintah Daerah sebagai entitas akuntansi wajib untuk menaati peraturan yang berlaku sebagai dasar penyelenggaraan akuntansi pada pemerintahan. Pelaksanaan dari Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ada di Indonesia juga diperkuat dengan adanya berbagai aturan hukum beserta perangkat peraturan yang ikut mengaturnya. Aturan hukum yang berlaku tersebut merupakan unsur yang menjadi kewajiban untuk ditaati maupun dilaksanakan sehingga dapat terhindar dari penyelewengan, penyimpangan,

maupun kecurangan dalam bentuk apapun yang kemudian dapat mengakibatkan timbulnya hambatan untuk tercapainya kinerja dari pemerintah daerah.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Zulharman, 2015) dan (Sella, 2021) menunjukkan hasil yang sama bahwa pemahaman akuntansi pemerintah berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Penelitian menunjukkan bahwa pemahaman akuntansi dapat meningkatkan kinerja pegawai karena pemahaman yang baik dapat memudahkan pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan meja kerja yang telah ditentukan.

Penerapan sistem akuntansi pemerintah juga dapat mempengaruhi akuntabilitas kinerja pemerintahan. Penelitian yang berkaitan dengan Penerapan sistem akuntansi pemerintah terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang dilakukan (Karima, dkk., 2021) menyebutkan bahwa penerapan sistem akuntansi pemerintah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Suatu instansi mampu menerapkan sistem akuntansi pemerintah daerah dengan baik, maka akuntabilitas kinerja pegawai pada instansi tersebut juga akan meningkat seiring dengan meningkatnya penerapan sistem akuntansi tersebut. Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Pratiwi dan Setyowati, 2017) menyatakan hal yang sebaliknya yaitu penerapan sistem akuntansi pemerintah tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Ketaatan pada peraturan perundang-undangan juga diduga dapat mempengaruhi akuntabilitas kinerja pemerintah daerah. Penelitian yang dilakukan oleh (Razi, 2017) berhasil membuktikan bahwa ketaatan pada peraturan

perundang-undangan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah daerah, namun hasil tersebut tidak sejalan dengan hasil penelitian (Lumenta, dkk., 2016) yang menyatakan bahwa ketaatan peraturan perundang-undangan tidak berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Beberapa penelitian yang berkaitan dengan pengaruh pemahaman akuntansi pemerintah, penerapan akuntansi pemerintah daerah, dan ketaatan pada peraturan perundang-undangan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah menunjukkan masih terdapat celah (*gap*) dalam penelitian tersebut, sehingga hal ini pula yang memotivasi peneliti untuk mengangkat kembali topik dalam sebuah penelitian.

Fenomena mengenai akuntabilitas kinerja sangat menarik untuk dikaji lebih jauh. Kenyataannya dalam beberapa tahun belakangan ini, fenomena yang terjadi dalam pengembangan sektor publik di Indonesia adalah menguatnya tuntutan akuntabilitas akan pengelolaan lembaga-lembaga publik baik pusat maupun daerah (Hasanah dan Ahmad, 2017 : 3). Hal tersebut juga berlaku pada Kabupaten Banyuasin, tuntutan akan akuntabilitas kinerja semakin tinggi terhadap lembaga-lembaga publik daerah khususnya pada SKPD, dengan berpedoman pada literatur yang telah ada, peneliti akan mencoba untuk menganalisis akuntabilitas kinerja di Kabupaten Banyuasin karena Kabupaten Banyuasin merupakan kabupaten yang masih tergolong baru yang ada di Sumatera Selatan. Kabupaten Banyuasin merupakan pemekaran dari Kabupaten Musi Banyuasin.

Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Kabupaten Banyuasin yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) pada tahun 2014 berada pada kategori B, sedangkan pada tahun 2015 menunjukkan terjadinya penurunan nilai evaluasi menjadi C (sumber: <http://rbkunwas.menpan.go.id>). Hal ini yang menjadi sorotan dari Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan, serta masyarakat. Hal ini juga yang membuat peneliti ingin mengetahui tingkat akuntabilitas kinerja di Kabupaten Banyuasin khususnya pada Sekretariat Daerah Kabupaten Banyuasin seberapa besar pemahaman akuntansi pegawai yang mengelola keuangan, apakah sudah disajikan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, dan ketaatan pada peraturan perundang-undangan yang telah menetapkan peraturan mengenai keuangan daerah dan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.

Berdasarkan uraian dari latar belakang yang telah dijelaskan diatas, dengan fenomena dan adanya *research gap* pada tema penelitian ini, maka peneliti tertarik untuk menguji kembali bagaimana pengaruh pemahaman akuntansi pemerintah daerah, penerapan sistem akuntansi pemerintah daerah, dan ketaatan atas peraturan perundang-undangan terhadap akuntabilitas kinerja pada Sekretariat Daerah Kabupaten Banyuasin dalam skripsi yang berjudul : **“Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Penerapan Sistem Akuntansi, dan Ketaatan Peraturan Perundang-Undangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja pada Sekretariat Daerah Kabupaten Banyuasin.”**

## **1.2 Perumusan Masalah**

Sesuai dengan latar belakang di atas, maka perumusan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah pemahaman akuntansi pemerintah, penerapan sistem akuntansi pemerintah daerah, dan ketaatan atas peraturan perundang-undangan secara simultan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja pada Sekretariat Daerah Kabupaten Banyuasin?
2. Apakah pemahaman akuntansi pemerintah secara parsial berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja pada Sekretariat Daerah Kabupaten Banyuasin?
3. Apakah penerapan sistem akuntansi pemerintah daerah secara parsial berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja pada Sekretariat Daerah Kabupaten Banyuasin?
4. Apakah ketaatan atas peraturan perundang-undangan secara parsial berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja pada Sekretariat Daerah Kabupaten Banyuasin?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan dilakukannya penelitian ini adalah:

1. Mengetahui pengaruh pemahaman akuntansi pemerintah, penerapan sistem akuntansi pemerintah daerah, dan ketaatan atas peraturan perundang-undangan terhadap akuntabilitas kinerja pada Sekretariat Daerah Kabupaten Banyuasin secara simultan.

2. Mengetahui pengaruh pemahaman akuntansi pemerintah daerah terhadap akuntabilitas kinerja pada Sekretariat Daerah Kabupaten Banyuasin secara parsial.
3. Mengetahui pengaruh penerapan sistem akuntansi pemerintah daerah terhadap akuntabilitas kinerja pada Sekretariat Daerah Kabupaten Banyuasin secara parsial.
4. Mengetahui pengaruh ketaatan atas peraturan perundang-undangan terhadap akuntabilitas kinerja pada Sekretariat Daerah Kabupaten Banyuasin secara parsial.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian tersebut dilakukan dengan harapan adanya manfaat yang dapat diambil bagi semua pihak yang berkepentingan, dan hasil dari analisis yang diperoleh dalam penelitian ini juga dapat memberikan manfaat untuk:

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai tambahan pengetahuan serta dapat mempelajari masalah-masalah yang berkaitan dengan pemahaman akuntansi pemerintah, penerapan sistem akuntansi pemerintah daerah, dan ketaatan atas peraturan perundang-undangan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Sekretariat Daerah Kabupaten Banyuasin.



## 2. Manfaat Praktis

### a. Bagi Pembaca

penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan bagi pembaca dan menyediakan informasi terkait dengan pemahaman akuntansi pemerintah, penerapan sistem akuntansi pemerintah daerah, serta ketaatan atas peraturan perundang-undangan terhadap akuntabilitas kinerja pada Sekretariat Daerah Kabupaten Banyuasin.

### b. Bagi Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya bahan kepustakaan dan Universitas Tridianti Palembang mampu memberikan kontribusi pengembangan teori, terutama yang berkaitan dengan akuntansi khususnya untuk memahami masalah yang sedang dibahas.

### c. Bagi Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Banyuasin

penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi praktis untuk menerapkan sistem akuntansi pemerintah daerah sebagai alat bantu untuk mengevaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Darwanis, dan Sephi, C. (2013, Juli 2). Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. *Jurnal Telaah dan Riset Akuntansi*, 6, 150-174.
- Donaldson, L., and Davis, J. (1989). CEO Governance and Shareholder Returns: Agency Theory or Stewardship Theory . *Paper Presented at The Annual Meeting of Management*.
- Haliah. (2015). Quality of Report, is there a Management, and Informasion Technology Role (Empirical Evidence from West Sulawesi Province, Indonesia). *International Journal of Economic Research (IJER)*, 177-193.
- Halim, A., dan Kusufi, M. S. (2017). *Teori, Konsep, dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik Dari Anggaran Hingga Laporan Keuangan Dari Pemerintah Hingga Tempat Ibadah Edisi Ke-2*. Jakarta: Salemba Empat.
- Hasanah, N., dan Fauzi, A. (2017). *Akuntansi Pemerintah*. Bogor: In Media.
- Intruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- Karima, D., Maslichah, dan Sudaryanti, D. (2021, Februari). Pengaruh Penerapan Akuntansi Pemerintah Daerah, Pemahaman Akuntansi, dan Ketaatan Pada Peraturan Perundang-Undangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah. *E-JRA*, 10, 10-24.
- Khusaini, M. (2018). *Keuangan Daerah*. Malang: Ub Press.
- Lumenta, A., Morasa, J., dan Mawikere, L. (2016). Pengaruh penerapan sistem akuntansi pemerintah daerah, pemahaman akuntansi, dan ketaatan pada peraturan perundangan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (Kabupaten Minahasa Selatan). *Jurnal EMBA*, 135-146.
- Madjir, S., dkk. (2021). *Pedoman Penulisan Skripsi dan Laporan Akhir Edisi Kedua Cetakan Pertama*. Palembang: Fakultas Ekonomi Universita Tridinanti Palembang .
- Mahsun, M., dkk. (2018). *Akuntansi Sektor Publik Edisi Ketiga*. Yogyakarta: BPF.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik. Edisi Terbaru*. ANDI.
- Mulyadi. (2016). *Sistem Informasi Akuntansi*. Jakarta: Salemba Empat.

- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.
- Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2003 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah.
- Pratiwi, R., dan Setyowati, L. (2017, Maret ). Determinan Yang Mempengaruhi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Semarang. *Jurnal Bisnis dan Ekonomi*, 24, 94-102.
- Raharjo, E. (2007). Teori Agensi dan Teori Stewardship Dalam Perspektif Akuntansi. *Fokus Ekonomi*, 37-46.
- Razi, R. F. (2017, Februari). Pengaruh Ketaatan Terhadap Peraturan Perundangan, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Pengendalian Akuntansi, dan Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). *JOM Fekom*, 4.
- Riantiarno, & Azlina. (2011). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. (Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hulu). *Jurnal Pendidikan Ekonomi dan Bisnis*, 3.
- Sella, E. S. (2021, Februari). Analisis Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah, Pemahaman Akuntansi, Ketaatan Pada Peraturan Perundangan dan Pengendalian Akuntansi Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. *E-JRA*, 10, 10-24.
- Setyawan, H., Tanjung, A., & Hariyani, E. (2017). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, dan Ketaatan pada Peraturan perundangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah dengan Kinerja Manajerial Sebagai Variabel Moderating. *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Riau*, 251-264.
- Shatu, Y. P. (2016). *Kuasai Detail Akuntansi Laba dan Rugi* . Jakarta: Pustaka Ilmu Semesta.
- Subagiyo, D. T., Andayani, I., dan Retnowati. (2017). *Buku Ajar Pengantar Hukum Indonesia*. Surabaya: Pusat Pengkajian Hukum dan Pembangunan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.

- Sudaryo, Y., Devyanthi, S., dan Nunung, A. (2017). *Keuangan di Era Otonomi Daerah*. Yogyakarta: ANDI.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Sumiati. (2012). Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD), Akuntabilitas Keuangan, Ketaatan pada Peraturan Perundangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (AKIP) (Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Siak).
- Wahid, I. (2016). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah, Sistem Pelaporan, dan Ketaatan Pada Peraturan Perundangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Riau*, 2457-2471.
- Zamzami, F., dan Nusa, N. D. (2017). *Akuntansi Pengantar 1*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Zirman, Darlis, E., dan Rozi, R. (2010, Maret). Pengaruh Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah, Penerapan Akuntabilitas Keuangan, Motivasi Kerja, dan Ketaatan pada Peraturan Perundangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. *Jurnal Ekonomi*, 18, 1-12.
- Zulharman, K. (2015). Pengaruh penerapan sistem akuntansi pemerintah daerah, pemahaman akuntansi, dan ketaatan peraturan pada peraturan perundangan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (Studi pada SKPD Kota Pekanbaru Baru). *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Riau*, 2, 1-15.